

PERAN BADAN PROMOSI DAN INVESTASI DAERAH (BPID) PROVINSI PAPUA DALAM MENINGKATKAN ARUS INVESTASI DI PAPUA

Edison Howay, Emmy Pangaribuan Simanjuntak¹, Sri Anggarini²

Penelitian mengenai Peran Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) Provinsi Papua merupakan jenis Penelitian Empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan BPID Provinsi Papua dalam upaya meningkatkan arus investasi di Papua sekaligus mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada para investor serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para investor dalam berinvestasi di Papua.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat penelitian studi dokumen.

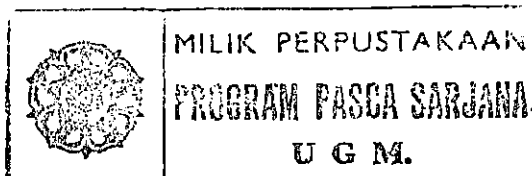
Penelitian ini dilakukan di Jayapura ibukota Provinsi Papua dengan pertimbangan karena obyek penelitian dalam hal ini Pejabat dilingkungan BPID Provinsi Papua semuanya berada di Jayapura. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan laporan hasil penelitian bersifat deskriptif analitis.

Hasil Penelitian dan Pembahasannya menunjukkan:

1. Kelembagaan BPID Provinsi Papua belum menunjukkan peran yang maksimal dan signifikan sesuai visioner pendirian lembaga BKPM. Kondisi ini disebabkan karena kebijakan regulasi yang belum memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan investor, juga kualitas aparat dilingkungan BPID yang belum sesuai dengan kualitas dan kompetensi yang layak.
2. Hal-hal yang menjadi penghambat aktifitas investasi di Papua adalah situasi keamanan yang belum kondusif (country risk), masalah hak ulayat atas tanah, dualisme kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani aktifitas investasi serta kualitas aparat baik pada lingkungan BPID Papua maupun instansi teknis terkait.

Diharapkan agar kebijakan yang memberikan prioritas kepada kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada porsi yang layak serta melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan investasi dalam upaya meningkatkan arus investasi ke Indonesia dan khususnya ke Papua.

Kata Kunci : **BPID, Peran, Investasi**



¹ Law Faculty Gadjah Mada University Yogyakarta

² Law Faculty Gadjah Mada University Yogyakarta

THE ROLE OF DISTRICT PROMOTION AND INVESTMENT BOARD (BPID) PAPUA PROVINCE IN INCREASING THE STREAM OF INVESTMENT IN PAPUA

Edison Howay, Emmy Pangaribuan Simanjuntak¹, Sri Anggarini²

A study on the Role Of District Promotion and Investment Board (BPID) of Papua Province was an empirical study in an effort to increase the stream of investment in Papua, Simultaneously to find out. This study as aimed to find out the Role of BPID Papua Province out the law protection given to the investor and what obstacle faced by the investor in investing in Papua.

The data used in the study was primary and secondary. The primary data was obtained through the field research using the data collecting technique of guided interview and observation, while the secondary data was obtained through the library research using the method of document study.

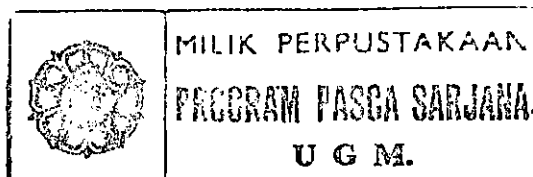
This study was carried out in Jayapura, the capital of Papua Province with consideration of the number of the object of this research, in this case officers in the environment of BPID of Papua Province, all were in Jayapura. The data obtained was analyzed qualitatively and the result of the study was descriptive analytic.

The result of the study and its discussion showed:

1. The Organizational of BPID Papua Province had not shown an optimum and significant role appropriate with the vision of the BKPM institution founder. This condition was caused by the policy of the regulation, which was not giving full authority to the local government in making decision things related to the investor, and also the quality of the officers in the BPID environment had not been appropriate with the quality and the liable competent.
2. Things that obstacle of investment activities in Papua was the security situation, which had not been conducive yet, country risk, the problem of the right on land, dualism of authority between the central and local government in handling the investment activities.

It is expected that the policy giving the priority to the institution of Badan Koordinasi Penanaman Modal in the appropriate portion and review the investment policy in order to increase the stream of investment to Indonesia, especially Papua.

Key Words: BPID, Role, Investment



¹ Law Faculty Gadjah Mada University Yogyakarta

² Law Faculty Gadjah Mada University Yogyakarta